

KEMISKINAN DI DAERAH KAYA SUMBERDAYA ALAM, SEBUAH PARADOKS PEMBANGUNAN

Oleh : Ahmad Zaini¹

Abstract

Poverty is a problem which always appear in each economy. Whom live in the poverty is the victim from economy system which unbiased in their limitation.

During the time economy system tend pay attention to the economy growth compared with result redistributing of development, so the wide of disparity become progressively. In fact, both of the other is not interfere in, exactly it contrary strengthening each other. Economy growth can be done at the same time with result of redistributing development. Here, government is the important roles, with their policy, government can be redistribute result of economy growth so it can be prosperous all the people in the region.

The region with have own resources, really have larger opportunity than other region to decrease the poverty. With that properties, government can make a lot of programs to decrease the poverty. But the history indicate that a lot of states which have not resources get better prosperity than state which rich of resources. The management of resource is the key, if truly managed will become benediction, but if not truly managed it will become curses.

Keywords : poverty, economy growth, resources

Pengantar

Miskin adalah kata yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Kemiskinan biasanya dikonotasikan dengan suatu kondisi atau keadaan yang lemah, serba kekurangan dan tidak berdaya. Semua orang pasti tidak menginginkan berada pada kondisi seperti itu, namun sekelompok orang dengan kondisi tersebut selalu ada dalam sebuah perekonomian. Mereka adalah korban dari sistem perekonomian yang cenderung tidak memihak pada keterbatasan masyarakat miskin. Kemiskinan adalah masalah yang serius dan akan menjadi beban dalam sebuah perekonomian, oleh karenanya perlu ditanggulangi secara serius pula. Berlarut-larutnya masalah itu dalam sebuah perekonomian, khususnya negara sedang berkembang, menunjukkan bahwa kemiskinan sulit dicari solusinya. Program-program penanggulangan kemiskinan telah banyak dilakukan namun banyak dari program-program tersebut yang tidak berhasil atau tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Masih segar dalam ingatan kita beberapa waktu yang lalu, di beberapa daerah di Indonesia terjadi kericuhan akibat banyaknya masyarakat yang mengantri hanya untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), zakat dan bahan makanan lain yang jumlahnya tidak seberapa. Bahkan dari kejadian-kejadian tersebut ada yang sampai mengakibatkan korban jiwa. Sungguh ironis, hanya untuk mendapatkan sesuatu yang tidak seberapa, nyawa dipertaruhkan. Melihat kondisi tersebut, wajar saja bila banyak pihak yang mempertanyakan kebijakan pemerintah dalam hal penanggulangan kemiskinan.

¹ Staf Pelaksana pada Bagian Kajian Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) III Lembaga Administrasi Negara, Samarinda.

Di sisi lain, Pemerintah bukannya tidak pernah melakukan sesuatu untuk menanggulangi kemiskinan, ada banyak kebijakan yang pernah dilakukan oleh pemerintah. Diantaranya adalah program raskin (beras untuk masyarakat miskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT), PNPM, BOS, Askeskin dan program-program lain yang ada di setiap departemen dan Pemerintah Daerah. Dari sekian banyak program yang dijalankan oleh pemerintah, permasalahannya adalah apakah kebijakan-kebijakan tersebut efektif dan tepat sasaran, karena realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks, yang penanggulangannya pun tidak mudah. Namun demikian, bukan berarti pemerintah dapat menjadikan hal tersebut sebagai tameng untuk bersembunyi dari kegagalannya menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya disebabkan atau dipengaruhi oleh terbatasnya pendapatan, tetapi juga dipengaruhi tingkat pendidikan dan kesehatan. Sehingga peran pemerintah tidak hanya berusaha bagaimana agar masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya, tetapi juga bagaimana dapat meringankan beban mereka khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah akan sulit maju dan berkembang, sehingga dapat mengurangi kesempatan seseorang untuk keluar dari kemiskinan. Demikian juga dengan tingkat kesehatan yang rendah, akan berakibat pada sumberdaya manusia yang tidak sehat dan tidak produktif.

Gambaran tentang kemiskinan di atas tentu saja sangat merisaukan karena kondisi ini terjadi di Indonesia, di negara yang besar dan dikenal dengan kekayaan sumberdaya alamnya. Meskipun tidak ada jaminan bahwa negara yang kaya dengan sumberdaya alam akan terbebas dari permasalahan kemiskinan, namun dengan kekayaan tersebut Indonesia sebenarnya memiliki peluang yang besar untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan di wilayahnya. Selain itu dengan kekayaan yang dimiliki, Indonesia sepatutnya dapat menanggulangi kemiskinan lebih baik dari negara lain di dunia.

Indonesia terdiri dari beberapa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dimana sebagian dari daerah-daerah tersebut memiliki kekayaan sumberdaya alam dan sebagian lagi tidak. Daerah yang kaya dengan sumberdaya alam saat ini umumnya masih tertinggal dari daerah-daerah lain akibat kebijakan masa lalu yang cenderung memusatkan pembangunan di Pulau Jawa. Maka tidak heran jika di masa otonomi daerah ini, daerah-daerah yang kaya dengan sumberdaya alam berlomba-lomba mengejar ketertinggalan mereka dengan melakukan pembangunan di berbagai bidang. Dana yang digunakan untuk pembangunan sebagian besar berasal dari dana bagi hasil sumberdaya alam yang nilainya memang cukup besar. Kondisi ini berbeda dengan sebelum otonomi daerah, dimana hasil dari sumberdaya alam dikelola secara terpusat dan dialokasikan sesuai dengan prioritas pemerintah pusat, tanpa ada pembagian yang jelas antara daerah penghasil dan pemerintah pusat. Oleh karena itu wajar jika ada daerah penghasil sumberdaya alam hanya mendapatkan sebagian kecil atau tidak sebanding dengan apa yang telah daerah hasilkan.

Pembangunan yang dilakukan oleh daerah-daerah seharusnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, namun kenyataannya masih ada beberapa daerah kaya sumberdaya alam yang masih bergelut dengan kemiskinan. Seharusnya dengan kekayaan yang dimiliki dan banyaknya pembangunan yang dilakukan, daerah yang kaya dengan sumberdaya alam memiliki kesempatan yang lebih besar dari daerah lain untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada permasalahan dalam pengelolaan dana dan pembangunan di daerah, khususnya daerah yang kaya dengan sumberdaya alam.

Dalam tulisan ini penulis akan berusaha menggambarkan permasalahan kemiskinan beserta alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah di beberapa daerah di Indonesia yang dikenal kaya dengan sumberdaya alamnya seperti Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Riau, Kalimantan Timur dan Papua.

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan dalam pembangunan yang harus dihadapi oleh wilayah-wilayah yang sudah maju maupun yang kurang maju. Kemiskinan umumnya ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas dalam akses sarana dan prasarana, modal dan kegiatan sosial ekonomi lainnya, sehingga tertinggal jauh dari masyarakat yang memiliki potensi yang lebih tinggi. Kondisi seperti ini umumnya akan memunculkan permasalahan-permasalahan baru, yang diantaranya adalah tingginya tingkat kriminalitas, dekadensi moral dan etika, produktivitas dan kreatifitas yang rendah dan permasalahan sosial lainnya akibat beratnya beban ekonomi masyarakat. Selain itu kemiskinan akan menghambat pembangunan wilayah, pemerataan pembangunan dan demokrasi ekonomi. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan perlu dijadikan prioritas utama dalam pembangunan suatu daerah.

Kemiskinan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan kronis (*chronic poverty*) atau kemiskinan struktural (*structural poverty*) dan kemiskinan sementara (*transient poverty*) (Adisasmita, 2005). Kemiskinan kronis (*chronic poverty*) atau kemiskinan struktural (*structural poverty*) disebabkan oleh; 1) Kondisi sosial budaya yang mendorong sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif; 2) Keterbatasan sumberdaya dan keterisolasian terutama penduduk yang tinggal di wilayah-wilayah kritis sumberdaya alam dan wilayah terpencil; dan 3) Rendahnya taraf pendidikan dan derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja dan ketidakberdayaan masyarakat dalam kegiatan ekonomi pasar.

Sedangkan kemiskinan sementara (*transient poverty*) dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya adalah; 1) Perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi; 2) Perubahan yang bersifat musiman seperti kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan; dan 3) Bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat atau wilayah-wilayah tertentu. Penanganan kemiskinan kelompok kedua relatif lebih mudah dibandingkan dengan kemiskinan kelompok yang pertama karena kemiskinan sementara terjadi akibat kondisi yang tidak normal. Berbeda dengan kemiskinan kronis yang dalam kondisi normal saja sulit untuk berkembang, sehingga diperlukan daya dan upaya yang tidak ringan untuk merubah kondisi tersebut.

Ada dua ukuran kemiskinan yang umumnya digunakan saat ini yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Mudrajad, 2006). Kemiskinan absolut dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak. Tingkat pendapatan minimum merupakan batas antara kondisi miskin atau tidak, yang sering disebut dengan garis kemiskinan. Disini masyarakat yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan masuk dalam kelompok masyarakat miskin, sebaliknya masyarakat yang berpendapatan di atas garis kemiskinan dianggap sebagai masyarakat yang tidak miskin.

Sedangkan kemiskinan relatif menggambarkan orang yang telah mencapai pendapatan minimum, bukan berarti dia tidak miskin. Meskipun pendapatan sudah mencapai kebutuhan dasar minimumnya, tetapi jika masih jauh dari pemenuhan kebutuhan hidup sederhana dalam lingkungannya maka orang tersebut masih dianggap miskin. Ini

disebabkan miskin lebih banyak ditentukan oleh lingkungan dan keluarga. Sehingga ukuran kemiskinan berbeda-beda di setiap lingkungan tergantung dengan kondisi umum lingkungan tersebut.

Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan aspek material saja tetapi juga berhubungan dengan aspek nonmaterial. Sehingga kemiskinan memiliki dimensi moneteris dan nonmoneteris. Orang miskin bukan hanya orang yang hidup dalam kekurangan pangan dan tingkat pendapatan rendah saja, tetapi juga orang yang hidup dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah. Kondisi selama ini menunjukkan bahwa kemiskinan umumnya disertai dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan orang miskin secara materi untuk dapat mengakses tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.

Ekonom pembangunan ternama, Ragnar Nurkse, menyatakan "*a poor country is poor because it is poor*". Hal ini menggambarkan lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*), dimana kemiskinan adalah penyebab sekaligus akibat dari kemiskinan itu sendiri. Adanya hubungan yang melingkar ini menjelaskan bagaimana kemiskinan membuat kita tidak dapat berbuat banyak untuk keluar dari kemiskinan itu sendiri. Keadaan yang miskin membuat kita tidak produktif dalam melakukan sesuatu yang berakhir pada kemiskinan kembali. Melihat kondisi yang seperti ini, rasanya sangat sulit bagi orang miskin untuk bisa keluar dari kemiskinan dengan usahanya sendiri, terkecuali jika ada orang atau pihak lain yang dapat menarik mereka keluar dari kemiskinan.

Dengan demikian sudah sepatutnya hal ini menjadi perhatian pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah dengan otoritasnya dapat menarik masyarakat miskin keluar dari kemiskinan dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan mereka dan atau kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi beban hidup mereka. Sehingga mereka dapat berkembang lebih maju dan keluar dari kemiskinan dengan keleluasaan yang didapat setelah beban hidupnya berkurang.

Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Program penanggulangan kemiskinan dalam sebuah perekonomian biasanya akan menemui masalah klasik yang selalu muncul, yaitu bagaimana dapat menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Hal ini menjadi masalah karena adanya korelasi yang cenderung positif antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan akibat distribusi pendapatan yang tidak merata. Kondisi ini jika dibiarkan akan semakin memperlebar kesenjangan antara si miskin dan si kaya dan berpotensi memunculkan konflik sosial di masa yang akan datang. Di sini, pemerintah sebagai pengambil kebijakan dituntut untuk dapat menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terjadi dan hasilnya dapat dinikmati secara merata oleh masyarakatnya, sehingga kesenjangan dapat dipersempit dan tingkat kemiskinan dapat diturunkan.

Pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan relatif sulit diwujudkan secara bersamaan jika hanya mengandalkan sistem ekonomi pasar. Untuk mengembangkan dan memajukan sebuah perekonomian jelas diperlukan pertumbuhan, pertumbuhan terjadi jika ada kegiatan yang produktif. Kegiatan produktif ini umumnya hanya bisa dilakukan oleh golongan masyarakat yang "mampu". Dengan kesempatan ini, kelompok masyarakat yang "mampu" akan mendominasi kegiatan ekonomi. Kelompok masyarakat miskin dalam hal ini hanya bisa menunggu "bagiannya" dari kegiatan kelompok masyarakat "mampu", yang dikenal dengan efek tetesan ke bawah (*trickle down effect*). Dengan efek tetesan ke

bawah ini diharapkan redistribusi pendapatan dapat terjadi dan masyarakat miskin akan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi.

Akan tetapi dalam kenyataannya efek tetesan ke bawah ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dimana keuntungan dari pertumbuhan sebagian besar masih dinikmati oleh golongan masyarakat yang “mampu”, masyarakat miskin hanya mendapatkan sebagian kecil atau bahkan tidak dapat sama sekali. Sehingga, pembangunan dengan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu tampaknya akan berakibat pada ketidakadilan dalam proses redistribusi pendapatan, yang pada gilirannya memperlihatkan adanya kerugian yang harus dibayar oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Hasilnya, kesenjangan antara si miskin dan si kaya akan semakin lebar.

Evaluasi atas model-model pembangunan di masa lalu memang penting untuk dilakukan sebagai pertimbangan untuk menentukan model-model pembangunan di masa datang. Kegagalan model pembangunan yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi sebagai mesin utama pembangunan tentu tidak bisa diulang karena pertumbuhan hanya salah satu unsur dalam proses pembangunan. Untuk itu, pembangunan tidak harus mengandalkan hanya pada pertumbuhan. Pembangunan harus mengakomodasi kepentingan kelompok masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Dalam menanggulangi kemiskinan dan memperkecil kesenjangan pendapatan di antara kelompok miskin, sedang, dan kaya, tampaknya perlu ada keberpihakan pemerintah yang jelas dan tegas dalam pembangunan.

Langkah-langkah peninjauan kembali terhadap prioritas pembangunan memang perlu dilakukan, yakni dari yang semula berorientasikan kepada maksimalisasi laju pertumbuhan GDP ke tujuan yang mengutamakan kepentingan masyarakat yang lebih luas dan langsung, seperti pengentasan kemiskinan serta pengurangan kesenjangan pendapatan. Meskipun laju pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis memberi jawaban atas berbagai macam masalah kemiskinan, namun laju pertumbuhan ekonomi tetap merupakan unsur penting dalam setiap program pembangunan yang sengaja dirancang untuk mengentaskan kemiskinan. Tanpa ada pertumbuhan sangat sulit bagi sebuah perekonomian untuk maju dan berkembang karena pertumbuhan berhubungan dengan produktivitas.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan distribusi pendapatan yang lebih merata tidak harus dipisahkan menjadi tujuan-tujuan pembangunan tersendiri. Pilihan yang diambil bukan antara strategi pembangunan yang akan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi atau strategi pembangunan yang menitikberatkan pada distribusi pendapatan secara lebih merata, karena kedua hal tersebut tidak saling bertentangan. Sehingga tujuan pembangunan seharusnya bukan hanya upaya untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga upaya untuk meningkatkan standar hidup sebagian besar rakyatnya dengan cara redistribusi pendapatan secara lebih merata baik secara langsung maupun tidak langsung.

Meskipun pandangan yang ada pada umumnya tidak menyinggung soal hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan, namun secara implisit mengisyaratkan bahwasanya distribusi pendapatan yang sangat tidak merata merupakan suatu yang terpaksa dikorbankan demi memacu pertumbuhan ekonomi secara cepat. Pandangan seperti ini sebenarnya dapat dipertanyakan kembali kebenarannya dengan alasan-alasan berikut (Todaro, 2000).

1. Orang-orang mampu sebenarnya memiliki kecenderungan tidak dapat diharapkan untuk dapat membangun perekonomian domestik. Golongan elit cenderung membelanjakan uangnya untuk barang-barang impor yang serba mewah dan berpesiar ke luar negeri, mereka juga lebih suka menyimpan kekayaannya di luar negeri dengan alasan keamanan dan sebagainya. Oleh karenanya strategi pembangunan dengan

mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan mengorbankan pemerataan pendapatan sebenarnya tidak lebih dari ekspresi sikap-sikap serakah dari golongan tertentu untuk mempertahankan kondisi yang sedemikian untuk kepentingan mereka sendiri, kalau perlu mengorbankan kepentingan masyarakat pada umumnya.

2. Selain itu rendahnya pendapatan dan taraf hidup orang miskin, yang terwujud berupa kondisi kesehatan yang buruk, kurang gizi dan pendidikan yang rendah sebenarnya akan menurunkan produktivitas perekonomian. Semakin banyak orang yang hidup dengan kondisi seperti ini pada akhirnya akan mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Kondisi sebaliknya akan terjadi jika pembangunan yang dilakukan memperhatikan aspek pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat luas. Masyarakat miskin akan berkurang dan menjadi lebih produktif yang pada gilirannya nanti akan meningkatkan produktivitas ekonomi nasional secara keseluruhan.
3. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin akan merangsang permintaan terhadap barang-barang produksi dalam negeri, seperti makanan dan pakaian. Sedangkan peningkatan pendapatan golongan kaya cenderung meningkatkan permintaan barang-barang mewah dan dari luar negeri. Dengan naiknya permintaan barang lokal, maka akan mendorong peningkatan produksi lokal, penciptaan lapangan kerja dan kenaikan persediaan modal serta tingkat investasi di dalam negeri. Kenaikan permintaan tersebut dengan sendirinya akan menciptakan kondisi yang sangat dibutuhkan bagi percepatan pertumbuhan ekonomi dan peran serta yang lebih merata dalam pertumbuhan tersebut.

Dengan tercapainya distribusi pendapatan yang lebih merata dan adil melalui upaya-upaya pengurangan kemiskinan masyarakat, maka segera tercipta banyak insentif atau rangsangan-rangsangan materiil dan psikologis bagi tumbuhnya kehidupan perekonomian yang sehat karena semakin membesarnya peran serta masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Sebaliknya jika kesenjangan pendapatan tetap bertahan, maka hal yang tercipta adalah serangkaian disinsentif materiil dan psikologis yang pada gilirannya nanti akan menghambat kemajuan ekonomi. Yang lebih parah lagi akan muncul kelompok masyarakat yang frustrasi dan akan menunjukkan sikap antipati terhadap kemajuan dan pembangunan pada umumnya. Sehingga teori pertumbuhan masa lalu yang cenderung mempertentangkan pertumbuhan dibandingkan dengan pemerataan pendapatan perlu dikoreksi karena hal itu bukanlah hal yang saling bertentangan.

Proses redistribusi pendapatan dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya dengan penerapan pajak secara proporsional terhadap pendapatan dan kekayaan pribadi mereka. Pajak diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah yang kemudian digunakan untuk meningkatkan berbagai program bantuan sosial dan peningkatan kesejahteraan serta pendapatan-pendapatan kelompok masyarakat yang berpenghasilan paling rendah.

Selain itu bisa juga melalui distribusi pendapatan secara langsung terutama sekali bagi kelompok-kelompok masyarakat yang berpenghasilan relatif rendah melalui anggaran belanja pihak pemerintah yang dananya bersumber dari pajak. Program peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin secara langsung ini biasa dikenal dengan pembayaran transfer (*transfer payment*). Atau dapat juga dengan cara tidak langsung seperti melalui penciptaan lapangan kerja, pembebasan uang sekolah, jaminan kesehatan, pemberian subsidi pendidikan dan sebagainya. Segenap kebijakan redistribusi pendapatan ini dilancarkan pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan riil bagi masyarakat miskin agar menjadi lebih tinggi daripada tingkat pendapatan semula.

Untuk lebih menjamin hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengurangan pengangguran melalui perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Saat ini muncul tiga jalur strategi pembangunan, yang terdiri dari :

1. Pro-Pertumbuhan (*pro-growth*), untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui upaya menarik investasi, ekspor dan bisnis, termasuk perbaikan iklim investasi;
2. Pro-Lapangan Kerja (*pro-job*), untuk menciptakan lapangan kerja termasuk di dalamnya menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan menciptakan hubungan industri yang kondusif;
3. Pro-Masyarakat Miskin (*pro-poor*), untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan, memperluas akses terhadap layanan dasar, dan merevitalisasi sektor pertanian, kehutanan, kelautan, dan ekonomi perdesaan.

Tiga strategi di atas dilaksanakan secara bersamaan tanpa mengutamakan salah satu diantaranya, sehingga pembangunan ekonomi yang dilaksanakan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Oleh karena itu, strategi yang digariskan adalah strategi “pertumbuhan disertai pemerataan” atau “*growth with equity*”. Percepatan pembangunan ekonomi akan dapat memberikan dampak yang positif, baik pada percepatan penurunan tingkat pengangguran maupun tingkat kemiskinan.

Dutch Disease dan Resource Curse

Pengalaman yang dapat dijadikan sebagai pelajaran dalam hal pembangunan di daerah kaya sumberdaya alam diantaranya adalah kondisi yang terjadi di Belanda pada tahun 1970-an, yang lebih dikenal dengan “*Dutch Disease*”. Pada masa itu Belanda menemukan gas alam di laut utara, yang kemudian dilakukan proses penambangan. Oleh karena cadangan gas yang ada cukup banyak, maka Belanda melakukan ekspor. Ekspor sumberdaya alam yang banyak diminati pasar ini kemudian menghasilkan apresiasi terhadap nilai kurs riil mata uang Belanda. Apresiasi terhadap nilai kurs ini jelas akan mengakibatkan harga produk dalam negeri, dalam hal ini sektor manufaktur, menjadi relatif lebih mahal dan kurang kompetitif di pasar internasional. Akibatnya industri dalam negeri akan menjadi lesu karena mengalami kesulitan dalam bersaing. Sedangkan valuta asing hasil ekspor gas alam digunakan untuk membeli produk impor yang menjadi relatif lebih murah.

Di sisi lain, sumberdaya dalam negeri, seperti buruh, akan terserap ke sektor sumberdaya alam karena memberikan tawaran upah yang lebih menarik. Konsekuensinya harga sumberdaya tersebut akan semakin tinggi, sehingga akan semakin menyulitkan sektor-sektor lainnya untuk berkembang, khususnya sektor-sektor yang tidak terkait dengan sektor pertambangan. Kondisi ini membuat ketergantungan terhadap sektor pertambangan semakin tinggi, sehingga perekonomian domestik akan menjadi sangat lemah dan rentan dengan gejolak kurs. Untuk mengatasi permasalahan akibat “*Dutch Disease*” ini pun tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama. Penghentian kegiatan sektor pertambangan bukanlah solusi, hal itu justru akan memperlemah perekonomian domestik karena industri domestik sudah sulit untuk dipulihkan.

Dalam jangka panjang kondisi ini tidak hanya berpengaruh pada sektor ekonomi saja, tetapi juga sosial dan politik. Sumberdaya alam dengan potensi keuangan yang cukup besar akan membuat penguasa cenderung melakukan penyelewengan-penyelewengan guna

mempertahankan kekuasaannya. Dengan kekuasaannya, penguasa dapat menggunakan dana yang ada untuk meningkatkan popularitasnya, baik melalui kebijakan-kebijakan yang populer maupun *money politics*. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan penguasa cenderung pragmatis, dimana tujuan utama kebijakan adalah bagaimana agar citra penguasa tetap baik didepan rakyat dan tidak bersifat substantif untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan rakyatnya. Dalam hal ini rakyat, khususnya rakyat yang awam, hanya dijadikan komoditi politik bagi penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Tanpa disadari, posisi rakyat diperlemah dan dipaksa untuk selalu bergantung dengan penguasa. Sistem politik seperti ini jika terus dibiarkan akan merusak sistem demokrasi dan kembali kepada sistem otorian.

Inilah yang dimaksud dengan kutukan sumberdaya alam (*Resource Curse*), dimana kekayaan sumberdaya alam tidak menjadikan masyarakatnya lebih sejahtera, tetapi sebaliknya membuat masyarakat semakin sengsara akibat konflik dan permasalahan yang muncul di daerah tersebut. Agar terhindar dari kutukan tersebut, penguatan peran institusi negara perlu dilakukan agar bisa menjamin rasa keadilan. Di Indonesia telah dijelaskan secara gamblang dalam konstitusinya, bahwasanya kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Negara harus mampu menjamin bahwa pengelolaan kekayaan sumberdaya alam dapat memberikan manfaat bagi seluruh rakyat. Daerah penghasil sumberdaya alam memang diberikan hak yang lebih dari daerah lain setelah penerapan otonomi daerah. Namun dengan mekanisme fiskal yang ada, pemerintah pusat juga bisa merelokasikan dana hasil sumberdaya alam untuk memajukan pembangunan di daerah-daerah lain.

Selain itu pemerintah daerah harus bisa memanfaatkan dana bagi hasil sumberdaya alam tersebut untuk menumbuhkembangkan kegiatan-kegiatan produktif dan mentransformasikan perekonomian pasca-sumberdaya alam. Sehingga ketika sumberdaya alam telah habis, tidak akan ada gejolak dan perekonomian tetap dapat berjalan dengan baik dan mampu memakmurkan rakyat. Keberhasilan dalam mengelola kekayaan alam tercermin antara lain dari peningkatan daya beli dan kesejahteraan rakyat yang lebih merata, sehingga walaupun kegiatan di sektor sumberdaya alam telah menurun ataupun berhenti, masyarakat telah memiliki kemampuan yang lebih untuk menghadapinya.

Perekonomian di Daerah Kaya Sumberdaya Alam

Di Indonesia terdapat beberapa daerah yang dikenal kaya dengan sumberdaya alam. Kegiatan ekonomi di daerah tersebut umumnya didominasi oleh kegiatan di sektor pertambangan dan galian. Daerah-daerah tersebut diantaranya adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Kalimantan Timur dan Papua.

Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) adalah provinsi yang terletak di wilayah paling barat Indonesia. Provinsi ini memiliki kekayaan alam berupa minyak bumi dan gas alam. Provinsi NAD sempat menjadi pusat perhatian dunia karena mengalami bencana yang besar pada akhir tahun 2004, lebih dari 200.000 jiwa hilang akibat gempa dan gelombang tsunami. Selain itu, Provinsi NAD adalah salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan keistimewaan karena diberikan otonomi khusus. Menurut data BPS, Provinsi NAD memiliki luas wilayah 57.956 km², yang terbagi menjadi 23 Kabupaten/kota, 276 Kecamatan dan 6.460 Desa/Kelurahan. Sedangkan jumlah penduduknya pada tahun 2008 diproyeksikan mencapai 4.293.900 jiwa.

Dari data PDRB terlihat bahwasanya penggerak ekonomi di Provinsi NAD ada dua sektor, yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan. Data lima tahun terakhir menunjukkan kedua sektor tersebut berkontribusi cukup besar terhadap pembentukan

PDRB Provinsi NAD, yaitu bekisar antara 19-28 persen. Meskipun sektor pertanian cukup besar berkontribusi terhadap PDRB, namun sektor migas (kegiatan pertambangan migas dan industri migas) tetap sangat berpengaruh terhadap perekonomian Provinsi NAD. Hal ini terlihat ketika kegiatan sektor migas mengalami penurunan, pertumbuhan ekonomi Provinsi NAD mengalami kontraksi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Provinsi NAD masih relatif bergantung dengan sumberdaya alam.

Selain Provinsi NAD, di Pulau Sumatera terdapat daerah lain yang dikenal memiliki banyak kekayaan alam, yaitu Provinsi Riau. Hampir semua kekayaan alam ada di provinsi ini, dari minyak bumi, batu bara, emas, timah hingga kekayaan hutan dan perkebunan. Luas wilayah Provinsi Riau adalah 87.023 km² yang terbagi menjadi 11 Kabupaten/Kota, 151 Kecamatan dan 1.622 Desa/Kelurahan. Sedangkan jumlah penduduk Provinsi Riau menurut data BPS tahun 2008 berjumlah 5.189.200 jiwa.

Kegiatan ekonomi di Provinsi Riau sangat didominasi oleh sektor pertambangan yang dapat dilihat dari komposisi PDRB provinsi tersebut. Menurut data BPS, lima tahun terakhir PDRB Provinsi Riau sangat didominasi oleh sektor pertambangan dan memiliki kecenderungan yang meningkat. Tahun 2004, kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB adalah 41,56 % dan terus meningkat hingga mencapai 44,78 % pada tahun 2008. Sedangkan kontribusi sektor-sektor yang lain relatif kecil dan cenderung menurun kecuali sektor konstruksi dan perdagangan, hotel dan restoran.

Di Pulau Kalimantan, provinsi yang dikenal kaya dengan sumberdaya alam adalah Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur adalah provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua. Dengan luas 204.534 km², Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 14 Kabupaten/Kota, 136 Kecamatan dan 1.421 Desa/Kelurahan. Sedangkan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur menurut data BPS tahun 2008 berjumlah 3.094.700 jiwa, dimana 44,29 % (1.370.748 jiwa) bertempat tinggal di daerah pedesaan dan 55,71 % (1.723.952 jiwa) bertempat tinggal di daerah perkotaan. Kalimantan Timur dianggap sebagai daerah yang kaya karena di daerah ini terdapat sumberdaya alam yang melimpah, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara dan lain-lain.

Aktivitas ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur beberapa tahun terakhir ini masih didominasi oleh kegiatan pertambangan dan galian. Menurut data BPS, pada tahun 2008 hampir separuh PDRB Kalimantan Timur merupakan kontribusi dari sektor pertambangan dan galian. Bahkan dominasi sektor pertambangan dan galian selama lima tahun terakhir cenderung meningkat, dari 39,61 % di tahun 2004 menjadi 45,83 % pada tahun 2008. Selain sektor pertambangan dan galian, ada sektor industri pengolahan yang juga berkontribusi cukup besar terhadap PDRB yaitu 34,26 %, tetapi mayoritas sektor industri pengolahan juga merupakan industri pengelolaan migas yang masih berbasis sumberdaya alam. Sedangkan sektor-sektor yang lain rata-rata hanya berkontribusi sekitar 2,84% dan memiliki kecenderungan menurun.

Satu daerah lain yang dikenal kaya dengan sumberdaya alam adalah Propinsi Papua. Provinsi Papua adalah provinsi terluas di Indonesia dan terletak di wilayah paling timur Indonesia. Sama dengan Provinsi NAD, Provinsi Papua mendapatkan keistimewaan dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia karena diberikan otonomi khusus. Luas wilayah Provinsi Papua mencapai 319.036 km² atau 16,7 % dari total wilayah Indonesia dan terbagi menjadi 29 Kabupaten/Kota dan 214 Kecamatan. Sebagian besar wilayah Propinsi Papua masih belum dirambah oleh aktivitas manusia karena provinsi ini hanya didiami oleh 2.056.500 penduduk. Sedangkan kekayaan alam yang dimiliki Provinsi Papua juga cukup banyak, dari minyak bumi, gas alam, tembaga dan lain-lain.

Kegiatan ekonomi di Provinsi Papua sama dengan daerah kaya sumberdaya alam lainnya, yaitu didominasi oleh sektor pertambangan dan galian. Berdasarkan data BPS, lebih dari separuh PDRB Provinsi Papua lima tahun terakhir merupakan kontribusi dari sektor pertambangan dan galian, bahkan tahun 2005 proporsi sektor ini mencapai 71,65 %. Sedangkan kontribusi sektor-sektor ekonomi yang lain cenderung berfluktuasi dan menurun. Dominasi sektor pertambangan dan galian di Provinsi Papua disebabkan oleh adanya kegiatan penambangan besar yang dilakukan oleh perusahaan tambang dunia, PT. Freeport. Selain itu, kondisi masyarakatnya yang mayoritas hidup di daerah pedalaman dan minim pengetahuan membuat pengembangan sektor-sektor ekonomi lain menjadi terhambat.

Tabel 1

Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Daerah Kaya Sumberdaya Alam Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008

LAPANGAN USAHA	NAD	RIAU	KALTIM	PAPUA (2007)
Pertanian	26,19	19,22	4,97	9,99
Pertambangan dan penggalian	18,88	44,78	45,83	68,74
Industri pengolahan	11,14	18,15	34,26	1,62
Listrik, gas dan air bersih	0,27	0,17	0,23	0,16
Konstruksi	8,52	4,09	2,13	4,66
Perdagangan, hotel & restoran	13,95	6,99	5,74	4,44
Pengangkutan dan komunikasi	8,89	1,76	2,97	4,05
Keuangan, real estate & jasa perush.	2,03	1,83	1,79	1,48
Jasa-jasa	10,14	3,00	2,09	4,86
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, 2009

Dari sisi perekonomian, keempat provinsi di atas memiliki ciri yang sama yaitu sebagian besar kegiatan ekonomi, yang digambarkan oleh PDRB, merupakan kontribusi sektor pertambangan dan galian terkecuali NAD. Namun jika sektor pertambangan dan galian digabungkan dengan industri migas, yang masih masuk dalam sektor sumberdaya alam, akan terlihat dominasinya terhadap PDRB NAD yaitu mencapai 27,37 %.

Ini adalah ciri umum yang dimiliki daerah penghasil sumberdaya alam, dimana daerah-daerah tersebut akan berusaha mengekstraksi sumberdaya alam yang ada karena memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Tanpa banyak mengeluarkan biaya, karena yang mengekstraksi adalah swasta, daerah akan mendapatkan bagi hasil yang tidak sedikit. Kondisi seperti ini wajar terjadi di daerah-daerah penghasil sumberdaya alam karena hal itu adalah kelebihan yang dimiliki daerah tersebut. Dengan kelebihan ini, daerah penghasil sumberdaya alam memiliki kesempatan untuk mendapatkan dana yang besar demi membiayai pembangunan di daerah tersebut.

Saat ini, yang menjadi perhatian seharusnya adalah apakah sumberdaya alam tersebut telah dikelola secara baik dengan memperhatikan aspek lingkungan dan hasilnya dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan seluruh masyarakat. Ini penting untuk diperhatikan karena permasalahan yang muncul di daerah-daerah penghasil sumberdaya alam umumnya berkaitan dengan hal-hal tersebut. Masalah lingkungan biasanya muncul

karena kegiatan penambangan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan sehingga seringkali di daerah penambangan terjadi bencana longsor, banjir dan lain-lain.

Sedangkan permasalahan bagaimana hasil sumberdaya alam digunakan masih menjadi bahan perdebatan. Daerah penghasil merasa bahwa dana bagi hasil yang diterima sangat kecil bila dibandingkan dengan sumberdaya alam yang dihasilkan, meskipun bagi hasil yang kecil tersebut belum tentu dapat diserap semuanya oleh daerah tersebut. Di sisi lain penggunaan dana bagi hasil sumberdaya alam oleh daerah penghasil masih dipertanyakan, apakah benar-benar diorientasikan pada kemaslahatan masyarakat atau tidak. Pertanyaan ini muncul karena di daerah yang kaya sumberdaya alam, saat ini sedang giat-giatnya membangun, tetapi pembangunan yang dilakukan umumnya adalah pembangunan fisik yang tidak berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan gedung-gedung pemerintahan yang sangat megah dan pemberian fasilitas mewah untuk pejabat daerah adalah kebijakan-kebijakan yang biasa dilakukan oleh pemerintah daerah yang kaya dengan sumberdaya alam, meskipun ada beberapa kebijakan yang secara langsung akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti subsidi pendidikan dan kesehatan, pembangunan jembatan, jalan dan lain-lain.

Penerimaan daerah dari sektor sumberdaya alam sebenarnya tidak dapat berlangsung lama dan terus menerus karena sumberdaya alam adalah sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui, sehingga penggunaannya pun harus mempertimbangkan kesiapan daerah ketika sumberdaya alam tersebut berkurang atau habis. Untuk itu perlu dikembangkan kegiatan ekonomi nonpertambangan yang dapat dijadikan lokomotif perekonomian baru di masa yang akan datang, berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Sehingga ketika sumberdaya alam telah berkurang atau habis, perekonomian daerah tetap dapat berjalan stabil dan mampu mensejahterakan masyarakat.

Tabel 2

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Daerah Kaya Sumberdaya Alam Tahun 2004-2008
(dalam juta rupiah)

Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008
NAD	50.357.262	56.951.612	70.786.835	73.196.270	73.530.750
Riau	114.246.374	139.018.996	167.068.189	210.002.560	276.400.130
Kaltim	133.704.074	180.289.090	199.588.125	212.096.644	315.220.362
Papua	24.842.904	43.615.319	46.892.057	55.365.778	54.733.628
Indonesia	2.295.826.200	2.774.281.100	3.339.216.800	3.949.321.400	4.954.028.900

Sumber : BPS, 2009

Dari keempat daerah di atas, pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dan Kalimantan Timur relatif stabil dibandingkan dengan dua daerah lainnya. Perekonomian kedua provinsi tersebut dalam lima tahun terakhir secara konsisten terus tumbuh, berbeda dengan perekonomian Provinsi NAD dan Papua yang cenderung berfluktuasi dan menurun. Perekonomian Provinsi Riau dan Kalimantan Timur relatif stabil karena skalanya yang cukup besar, dimana PDRB Provinsi Riau pada tahun 2008 mencapai 5,58% dari PDB Nasional dan PDRB Provinsi Kalimantan Timur pada tahun yang sama mencapai 6,36% dari PDB Nasional. Selain itu potensi sumberdaya alam yang belum tergali di kedua daerah tersebut masih cukup besar dan sektor-sektor ekonomi nonpertambangan tetap tumbuh meskipun proporsinya terhadap PDRB cenderung berfluktuasi.

Sedangkan ketidakstabilan perekonomian di Provinsi NAD dan Papua lebih cenderung disebabkan oleh faktor nonekonomi. Bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Provinsi NAD pada akhir tahun 2004 sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah tersebut. Pada tahun 2004 PDRB Provinsi NAD mencapai Rp. 50 Trilyun, sedangkan pada tahun 2005 secara riil turun lebih dari 10%. Penurunan PDRB ini disebabkan oleh penurunan kegiatan ekonomi di hampir seluruh sektor akibat bencana gempa bumi dan tsunami. Hingga tahun 2008, perekonomian Provinsi NAD belum juga membaik karena sektor sumberdaya alam (pertambangan dan industri migas) yang dahulu menjadi sektor unggulan tidak kunjung membaik. Produksi sektor sumberdaya alam (pertambangan dan industri migas) terus mengalami penurunan, sehingga perekonomian Provinsi NAD mengalami fluktuasi dan cenderung menurun.

Selain perekonomian Provinsi NAD, faktor nonekonomi juga berpengaruh terhadap perekonomian Provinsi Papua. Kondisi mayoritas masyarakat yang hidup di daerah pedalaman dengan kondisi alam yang tidak bersahabat ditambah dengan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah membuat perekonomian Provinsi Papua sulit untuk tumbuh, sehingga perekonomian sangat ditentukan oleh sektor pertambangan. Hal ini dapat dilihat dari data PDRB lima tahun terakhir, jika sektor pertambangan tumbuh maka perekonomian Provinsi Papua akan tumbuh dan sebaliknya jika sektor pertambangan turun maka perekonomian Provinsi Papua akan turun.

Kemiskinan di Daerah Kaya Sumberdaya Alam

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kemiskinan adalah permasalahan yang selalu dihadapi oleh setiap perekonomian, baik perekonomian yang sudah maju maupun yang belum. Begitu pula dalam perekonomian daerah-daerah yang dikenal dengan kekayaan sumberdaya alamnya, kekayaan alam tidak menjamin suatu daerah akan terbebas dari kemiskinan. Kekayaan alam akan berakibat pada kesejahteraan masyarakat jika hasilnya benar-benar dikelola untuk kepentingan masyarakat.

Menurut data BPS, dengan rata-rata garis kemiskinan nasional sebesar Rp.182.636 per kapita per bulan, tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2008 adalah 15,42% dari total jumlah penduduk Indonesia atau mencapai 35 juta penduduk miskin. Penduduk miskin tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dimana lebih dari separuhnya berada di Pulau Jawa (57%) dan tinggal di daerah pedesaan (63%). Jika menggunakan standar garis kemiskinan versi Bank Dunia, US\$ 2 per hari atau Rp.18.000 per hari, dapat dipastikan tingkat kemiskinan di Indonesia akan semakin tinggi.

Bisa dibayangkan, dengan standar garis kemiskinan Rp.182.636 per bulan atau Rp.6.488 per hari jika dikalkulasikan dengan biaya hidup seseorang perharinya, sangatlah tidak mencukupi. Untuk kebutuhan makan dan minum saja jauh dari cukup, apalagi jika ditambahkan dengan kebutuhan sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang sebenarnya hidup kurang layak tetapi tidak masuk dalam kategori miskin.

Tingkat kemiskinan secara nasional lima tahun terakhir cenderung menurun dengan sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2006, begitu pula dengan daerah-daerah yang dikenal dengan kekayaan sumberdaya alam dengan tingkat penurunan yang berbeda-beda. Kenaikan tingkat kemiskinan tahun 2006 adalah akibat dari kebijakan pemerintah yang mengurangi subsidi BBM pada tahun 2005, sehingga memicu kenaikan harga barang dan jasa. Adapun laju penurunan tingkat kemiskinan yang tertinggi selama lima tahun terakhir adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan laju penurunan 17,80% dan yang

terendah adalah Provinsi Papua dengan laju penurunan 4,16 %, sedangkan secara nasional 7,44 %.

Tingkat kemiskinan di daerah yang dikenal dengan kekayaan sumberdaya alam, seperti telah disebutkan di atas kondisinya berbeda-beda. Provinsi Riau dan Kalimantan Timur terlihat kondisinya lebih baik dibandingkan dengan dua daerah lainnya, Provinsi NAD dan Provinsi Papua. Kondisi ini sejalan dengan keadaan perekonomian di daerah-daerah tersebut, dimana kondisi ekonomi Provinsi Riau dan Kalimantan Timur yang relatif lebih baik dan stabil dibandingkan dengan Provinsi NAD dan Provinsi Papua. Penurunan produksi sektor pertambangan dan industri migas, jumlah penduduk yang cukup banyak serta ketidaksiapan sektor non-sumberdaya alam membuat perekonomian Provinsi NAD sulit untuk tumbuh. Begitu pula dengan Provinsi Papua, ketergantungan yang sangat tinggi dengan sektor sumberdaya alam, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah serta kondisi alam yang tidak bersahabat membuat perekonomian tidak stabil dan tidak efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

Tabel 3

Persentase Penduduk Miskin di Daerah Kaya Sumberdaya Alam Tahun 2003-2008

Daerah	2004	2005	2006	2007	2008
Provinsi NAD	28,47	28,69	28,28	26,65	23,53
Provinsi Riau	13,12	12,51	11,85	11,20	10,79
Provinsi Kaltim	11,57	10,57	11,41	11,04	9,51
Provinsi Papua	38,69	40,83	41,52	40,78	37,08
Indonesia	16,66	16,69	17,75	16,58	15,42

Sumber : BPS, 2009

Dengan membandingkan perekonomian (PDRB) masing-masing daerah dengan tingkat kemiskinan, dapat kita lihat bahwasanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Jika dilihat korelasinya selama lima tahun terakhir, PDRB dan tingkat kemiskinan di Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Timur cenderung memiliki korelasi yang negatif, sedangkan Provinsi NAD dan Provinsi Papua cenderung berkorelasi positif. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Timur berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan, sebaliknya pertumbuhan ekonomi di Provinsi NAD dan Provinsi Papua akan menaikkan tingkat kemiskinan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan atau tingkat pemerataan pembangunan di Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Timur lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi NAD dan Provinsi Papua. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat dipengaruhi oleh dominasi sektor pertambangan dalam kegiatan ekonomi beberapa daerah di atas. Sebagaimana diketahui sektor pertambangan tidak melibatkan banyak pekerja ataupun masyarakat, dan proses produksinya pun cukup singkat dan sederhana sehingga dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pun tidak besar.

Cukup bervariasinya dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan tingkat kemiskinan ini menegaskan kembali bahwasanya pemberantasan kemiskinan tidak bisa jika hanya mengandalkan pertumbuhan tanpa ada usaha untuk melakukan distribusi pendapatan secara merata. Kondisi kemiskinan diatas dipastikan akan semakin parah jika

pemerintah tidak melakukan tindakan apa pun. Sebagaimana diketahui selama ini pemerintah telah melakukan berbagai hal untuk mengurangi kesenjangan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan produktivitas dan atau meringankan beban hidup masyarakat miskin. Kebijakan-kebijakan seperti pemberian subsidi pendidikan, asuransi kesehatan untuk orang miskin, pembangunan infrastruktur dan lain-lain adalah beberapa bentuk redistribusi pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan agar hasil dari pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

Keberhasilan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat juga dapat dilihat melalui indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks tersebut tidak hanya menggambarkan perkembangan perekonomian, tetapi juga perkembangan sosial dan kesejahteraan manusia. IPM tidak hanya mempertimbangkan standar hidup yang layak, tetapi juga mempertimbangkan indikator harapan hidup dan pencapaian pengetahuan. Menurut data BPS tahun 2008, IPM Provinsi Riau adalah 75,09, sedangkan Provinsi Kalimantan Timur 74,52. Kondisi ini lebih baik dibandingkan dengan IPM Provinsi NAD (70,76) dan Provinsi Papua (64,00), meskipun kesemuanya masih belum mencapai kondisi ideal menurut UNDP atau Bank Dunia pada skor 80. Hal ini mengindikasikan kondisi ekonomi, kesehatan dan pendidikan masyarakat Provinsi Riau dan Kalimantan Timur lebih baik dibandingkan dengan Propinsi NAD dan Papua.

Perbedaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah daerah juga sangat berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan di daerah-daerah tersebut. Pada era otonomi yang diterapkan sejak tahun 1999, kepala daerah diberi kebebasan untuk menciptakan kebijakan yang inovatif dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan mengingat kondisi kemiskinan di setiap daerah berbeda satu dengan yang lain. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah umumnya seperti memberikan pelayanan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis dan kebijakan lain yang dapat mengurangi beban hidup masyarakat miskin.

Penanggulangan Kemiskinan dan Permasalahannya

Program-program penanggulangan kemiskinan sebenarnya telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sejak lama. Program-program tersebut dilaksanakan untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang lebih sejahtera sesuai dengan tujuan didirikannya negara Indonesia. Pada masa pemerintahan orde lama, pemerintah pernah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan melalui strategi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat yang tertuang dalam Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun (Penasbede), meskipun program tersebut akhirnya terhenti akibat krisis politik.

Pada masa orde baru, pemerintah kembali membuat program penanggulangan kemiskinan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita I-IV ditempuh secara reguler melalui program sektoral dan regional, sedangkan Repelita V-VI pemerintah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dengan strategi menuntaskan masalah kesenjangan sosial-ekonomi dengan mensinergikan program reguler sektoral dan regional yang diwujudkan melalui program Inpres Desa tertinggal (IDT). Upaya ini akhirnya gagal akibat krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 yang berakibat pada berakhirnya masa pemerintahan orde baru.

Krisis ekonomi dan politik yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 berdampak pada tingkat kemiskinan yang semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi dan politik yang tidak kondusif, sehingga dunia usaha sulit berkembang, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi secara massal, harga barang-barang meningkat akibat

kelangkaan dan lain-lain. Tingginya tingkat kemiskinan akibat krisis ini mendorong pemerintah mengeluarkan program Jaring Pengaman Sosial yang dikoordinasikan melalui Keppres Nomor 190 Tahun 1998.

Melihat program penanggulangan kemiskinan yang belum juga bisa bekerja secara optimal, maka pada tahun 2001 pemerintah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) yang berfungsi sebagai forum lintas pelaku dalam melakukan koordinasi perencanaan, pembinaan, pemantauan dan pelaporan seluruh upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan komitmen yang telah dibuat bersama dengan para pemimpin dunia lainnya untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan dengan beberapa tujuan dan target yang dikenal sebagai Millennium Development Goals (MDGs). Untuk semakin mempertajam keberadaan Komite Penanggulangan Kemiskinan, pada tahun 2005 melalui peraturan presiden dibentuklah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang keberadaannya diharapkan dapat melanjutkan dan memantapkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh KPK.

TKPK bertugas melakukan langkah-langkah konkret untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah NKRI melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) ini merupakan forum lintas pelaku yang terdiri dari semua unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga keuangan dan perbankan, usaha nasional, kelompok swadaya masyarakat, akademisi, dan unsur masyarakat lainnya, untuk menggalang kontribusi gagasan dan saran implementasi yang konstruktif dan maju, bagi peningkatan keberhasilan penanggulangan kemiskinan. TKPK tidak hanya dibentuk di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat provinsi dan kabupaten, dengan harapan TKPK di daerah dapat mengkoordinasikan program-program penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi dan kabupaten bersama dengan pemerintah daerah, kalangan swasta, kelompok swadaya masyarakat, akademisi dan unsur masyarakat lainnya.

Program-program yang dilakukan TKPK dapat dibagi menjadi 3 kelompok program, yaitu :

1. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pada bantuan dan perlindungan sosial yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Program-program yang dilakukan dalam kelompok ini diantaranya adalah penyaluran beras bersubsidi untuk keluarga miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan program keluarga harapan.
2. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pada pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Program-program yang dilakukan dalam kelompok ini dikonsolidasikan ke dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang diantaranya adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)
3. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pada pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Program-program yang dilakukan dalam kelompok ini diantaranya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta khususnya perbankan.

Selain dilakukan oleh pemerintah pusat, program-program penanggulangan kemiskinan juga dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah, tak terkecuali pemerintah daerah yang dikenal dengan kekayaan sumberdaya alam. Peranan pemerintah daerah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sebenarnya sangat penting, terutama dalam era otonomi daerah. Secara umum, keberadaan pemerintah daerah adalah untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya. Untuk itu kegiatan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah sudah sepatutnya merujuk pada hal tersebut.

Upaya yang umumnya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menurunkan tingkat kemiskinan, diantaranya adalah meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat, meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia, dan menyediakan infrastruktur yang memadai.

Meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Kesempatan berusaha diberikan dalam bentuk yang bermacam-macam, misalnya pembangunan wilayah pedesaan yang dapat memperkuat dan meningkatkan kegiatan ekonomi pertanian. Peningkatan kegiatan ekonomi pertanian akan sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat miskin yang sebagian besar memang berada di wilayah pedesaan. Tidak heran jika di beberapa daerah terdapat program bantuan khusus untuk setiap desa. Selain itu bisa juga dalam bentuk program-program yang dapat mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang usaha unggulan daerah yang memiliki keterkaitan usaha ke depan (*forward linkages*) dan ke belakang (*backward linkages*) yang kuat. Keterkaitan usaha yang kuat ini menunjukkan besarnya pengaruh usaha tersebut terhadap sektor usaha disekitarnya. Peningkatan kegiatan usaha tersebut akan berdampak pada peningkatan kegiatan sektor usaha disekitarnya.

Upaya meningkatkan Sumberdaya Manusia diyakini dapat menurunkan tingkat kemiskinan karena dengan sumberdaya manusia berkualitas, kemampuan dan kesempatan masyarakat untuk maju dan berkembang lebih besar. Selain itu, pembangunan sumberdaya manusia adalah investasi untuk masa depan, bukan ongkos pembangunan, yang nantinya dapat mengelola sumberdaya yang ada sehingga dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Adapun peningkatan kualitas sumberdaya manusia tidak lepas dari peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Program-program untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat berupa peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, serta penuntasan pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas). Kebijakan-kebijakan di daerah yang mendukung program-program tersebut diantaranya subsidi pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah, peningkatan kualitas guru, pembangunan infrastruktur sekolah dan lain-lain. Oleh karena pentingnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan, UUD juga telah mengamanatkan pemerintah untuk mengalokasikan 20% dari total anggarannya untuk sektor pendidikan.

Sedangkan upaya untuk meningkatkan sumberdaya manusia dari sisi kesehatan, pemerintah daerah dapat meningkatkan jumlah, jaringan, dan kualitas Puskesmas hingga ke wilayah pedalaman dan daerah terpencil. Selain itu, penambahan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin, penanggulangan gizi buruk pada anak balita, dan lain-lain.

Upaya ketiga yang dilakukan pemerintah daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan adalah menyediakan infrastruktur yang memadai. Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan dianggap cukup penting karena saat ini kondisi infrastruktur di daerah, khususnya diluar pulau jawa, masih jauh tertinggal dengan kondisi di pulau jawa.

Hal ini adalah akibat dari kebijakan masa lalu yang cenderung lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur di pulau Jawa di bandingkan dengan di luar Jawa. Pembangunan infrastruktur perlu dilakukan sebagai sarana penopang pembangunan dan pelayanan publik. Daerah yang memiliki infrastruktur yang memadai cenderung lebih memudahkan masyarakat melakukan kegiatannya. Sehingga diharapkan dengan pengembangan infrastruktur, semakin banyak masyarakat yang dapat berkembang karena adanya kemudahan-kemudahan akibat adanya pembangunan infrastruktur tersebut. Pada akhirnya roda pembangunan pun dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan seluruh masyarakatnya pun mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut, sehingga bisa hidup lebih sejahtera.

Program-program penanggulangan kemiskinan di atas sebenarnya sudah cukup baik dan relatif ideal, namun pada tataran implementasi tidak demikian. TKPK yang diharapkan dapat mengkoordinasikan program-program penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat dan daerah ternyata tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Mayoritas TKPK di tingkat daerah ternyata belum bisa menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan di beberapa daerah ada yang belum terbentuk. Tidak berfungsinya TKPK daerah berdampak pada tidak efektifnya program penanggulangan kemiskinan karena hanya mengandalkan TKPK pusat yang wilayah kerjanya sangat luas. TKPK daerah sebenarnya ujung tombak keberhasilan program penanggulangan kemiskinan karena yang mengetahui permasalahan di daerah adalah orang-orang daerah. Ketiadaan institusi maupun fungsi TKPK di daerah menunjukkan pemerintah daerah kurang serius dalam menanggulangi kemiskinan dan membuat program penanggulangan kemiskinan kembali ke masa lalu, dimana tidak ada koordinasi antar instansi dan berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan persepsi masing-masing instansi. Kondisi seperti ini ternyata terjadi hampir di seluruh daerah termasuk daerah-daerah yang dikenal kaya sumberdaya alam.

Tidak adanya koordinasi antara program-program penanggulangan kemiskinan yang tersebar di beberapa instansi membuat program-program tersebut tidak bisa efektif atau mencapai sasaran. Tidak aneh jika ada beberapa program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di satu tempat, sedangkan di tempat lain ada satu atau lebih wilayah yang sama sekali tidak mendapatkannya. Pada akhirnya nanti, program penanggulangan kemiskinan akan kembali disesuaikan dengan keinginan para penguasa. Pertimbangan yang digunakan pun tidak lagi objektif untuk menanggulangi kemiskinan tetapi lebih cenderung dilatarbelakangi oleh kepentingan politik penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Bantuan untuk masyarakat miskin sebagian besar bersifat konsumtif yang secara substansi tidak bisa menanggulangi kemiskinan, sehingga masyarakat miskin hanya dijadikan komoditi politik untuk memenuhi ambisi penguasa. Kondisi seperti ini ternyata banyak terjadi di daerah-daerah yang kaya dengan sumberdaya alam, dengan anggaran yang sangat besar, efektifitas program-program yang dilakukan sering kali tidak diperhatikan karena tujuan utamanya adalah bagaimana agar anggaran dapat terserap semua dan dapat mengangkat citra penguasa.

Permasalahan lain yang muncul dalam penanggulangan kemiskinan adalah maraknya praktek korupsi. Daerah-daerah kaya sumberdaya alam dengan anggaran yang sangat besar jelas menarik bagi para koruptor, baik dari kalangan aparatur pemerintah maupun dari pelaksana program atau kalangan swasta. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pejabat-pejabat di daerah-daerah tersebut yang tersangkut dengan kasus korupsi. Banyak sekali program-program yang sebenarnya dapat berguna dan mengurangi tingkat kemiskinan menjadi sia-sia dikarenakan korupsi. Jika uang hasil korupsi itu digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, bisa dipastikan tingkat kemiskinan akan jauh berkurang. Tindakan tegas terhadap koruptor memang perlu dilakukan mengingat korbannya tidak hanya satu atau dua orang saja, tetapi ribuan bahkan jutaan

orang. Bahkan yang menjadi korban sebagian besar adalah masyarakat miskin, maka dapat dikatakan juga bahwa korupsi adalah salah satu penyebab yang dapat meningkatkan kemiskinan.

Hal terpenting bagi daerah yang kaya dengan sumberdaya alam dalam menanggulangi kemiskinan adalah bagaimana hasil sumberdaya alam yang dihasilkan saat ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan kata lain, pengambilan sumberdaya alam harus memperhatikan dampak lingkungan dan hasilnya dapat digunakan untuk mengembangkan sektor ekonomi lainnya khususnya sektor ekonomi non-sumberdaya alam agar nanti ketika sumberdaya alam telah habis perekonomian tetap dapat berkembang dengan baik dan mampu mensejahterakan masyarakat. Pemilihan sektor unggulan yang akan dijadikan lokomotif baru perekonomian pasca-sumberdaya alam harus mempertimbangkan potensi yang ada di setiap daerah dan keterlibatan masyarakat setempat. Sektor unggulan tersebut harus berbasis pada sumberdaya yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) dan banyak melibatkan penduduk setempat agar perekonomian dapat berkembang dengan baik dan hasilnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Jika hal ini benar-benar diterapkan, ketakutan akan terjadinya *Dutch Disease* dan *Resource Curse* tidak akan ada. Justru sebaliknya, dimana sumberdaya alam akan membuat masyarakat hidup lebih baik dan sejahtera.

Penutup

Pada dasarnya kemiskinan adalah permasalahan setiap perekonomian di dunia, baik perekonomian negara maju, maupun negara belum maju. Permasalahan kemiskinan biasanya muncul akibat tidak meratanya distribusi pendapatan dari hasil pertumbuhan ekonomi. Selama ini pandangan yang berkembang cenderung mempertentangkan laju pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan yang merata. Pengambil kebijakan diminta untuk memilih salah satu diantaranya untuk dijadikan tujuan pembangunan karena dianggap tidak dapat diwujudkan secara bersamaan. Padahal kedua hal tersebut tidak bertentangan satu dengan yang lain, bahkan keduanya bisa saling melengkapi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi akibat pertumbuhan ekonomi.

Kondisi ini terjadi pula di daerah yang dikenal kaya dengan sumberdaya alam, seperti Provinsi NAD, Riau, Kalimantan Timur dan Papua. Sebagai daerah yang kaya dengan sumberdaya alam wajar jika sebagian besar aktifitas ekonominya dikuasai oleh sektor pertambangan. Dengan kekayaan alam yang dimiliki, daerah-daerah tersebut tentu mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit. Berlakunya otonomi daerah membuat daerah-daerah yang kaya dengan sumberdaya alam mendapatkan dana bagi hasil sektor pertambangan yang cukup besar, bahkan Provinsi NAD dan Papua mendapat bagi hasil yang lebih besar karena berstatus otonomi khusus. Meskipun dikenal sebagai daerah yang kaya, daerah-daerah tersebut tetap memiliki permasalahan dengan kemiskinan.

Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan sebenarnya sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan, tetapi hasilnya masih kurang efektif. Program-program tersebut ada yang berupa pengembangan sumberdaya manusia dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu ada juga program pembangunan infrastruktur yang secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan sektor UMKM yang dapat menciptakan banyak lapangan kerja. Program-program di atas sebenarnya sudah cukup baik dan relatif ideal, namun dalam pelaksanaannya tidak demikian. Ada banyak masalah

di lapangan yang membuat program-program penanggulangan kemiskinan tidak bisa berjalan efektif. Tidak adanya koordinasi antar instansi karena tidak berfungsinya tim koordinasi, menunjukkan ketidakseriusan aparat pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Ketiadaan koordinasi membuat program penanggulangan kemiskinan kembali ke masa lalu, dimana pelaksanaan program dilandasi oleh banyak kepentingan politik. Masalah lain yang muncul adalah maraknya praktek korupsi di daerah, khususnya daerah yang kaya dengan sumberdaya alam.

Agar sumberdaya alam bisa mensejahterakan rakyat, maka pengelolaannya harus benar-benar untuk kepentingan rakyat. Pengambilan sumberdaya alam hendaknya memperhatikan faktor lingkungan agar tidak menjadi masalah di masa yang akan datang. Selain itu hasilnya digunakan untuk mengembangkan sektor ekonomi non-sumberdaya alam yang bisa dijadikan penggerak ekonomi pada masa dimana sumberdaya alam tidak bisa diharapkan lagi. Hal ini penting agar perekonomian tetap bisa berjalan dengan baik dan mampu untuk mensejahterakan masyarakat meskipun sumberdaya alam yang dimiliki telah habis.

Daftar Referensi

- _____, 2009. *Capaian Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 2005-2009*, Jakarta: TKPK Nasional
- Adisasmita, Rahardjo, H. 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah, Edisi 1*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Giyanto, Bambang, 2008. "Strategi Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus DKI Jakarta)", dalam *Jurnal Borneo Administrator*, Volume 4 No.2, Samarinda: PKP2A III LAN
- Humphreys, Macartan; Sachs, Jeffrey D. dan Stiglitz, Joseph E.. 2007. *Berkelit dari Kutukan Sumberdaya Alam*, diterjemahkan dari *Escaping The Resource Curse*, Bogor: The Samdhana Institute
- Jhingan, ML. 2007. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Edisi 1*, Penerjemah: D. Guritno, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomika Pembangunan: Teori, masalah dan kebijakan, Edisi 4*, Yogyakarta: AMP YKPN
- Sumarsono, S., 2007. "Efektivitas Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah", dalam *Newsletter SMERU*, No.21, Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU
- Susanto, Hari. 2007. *Pertumbuhan Vs Pemerataan?*, <http://202.146.5.33/kompas-cetak/0706/15/opini/3602671.htm>
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi, Edisi 5*, Penerjemah: Haris Munandar, Jakarta: Bumi Aksara
- Utomo, Tri Widodo W., 2005. "Pengelolaan SDA dan Kesejahteraan Rakyat", dalam *Jurnal Borneo Administrator*, Volume 1 No.2, Samarinda: PKP2A III LAN
- www.bi.go.id
- www.bps.go.id